

# ROAD MAP Universitas Timbul Nusantara

## PROLOG

**Universitas Timbul Nusantara** yang disingkat UTIRA telah menempuh perjalanan dari embrio yang disebut prolog, dikukuhkan menjadi STIE-IBEK (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK) dan dirubah menjadi Universitas Timbul Nusantara (UTIRA).

## Badan Hukum Yayasan

UTIRA dikelola oleh Yayasan Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan (IBEK). Yayasan IBEK didirikan pada tanggal 7 Desember 1981 dengan akte Notaris Wenda Sungkar Alumei, S.H, dengan nomor akte 60 tanggal 18 Desember 1991 dan diamandemen dengan akte Notaris oleh Notaris Lieke L.Tukgali No.86 tanggal 18 Desember 1993, dimana sesuai dengan perjalanan waktu mengalami beberapa kali amandemen di sesuaikan dengan perubahan aturan tentang Yayasan, terakhir dengan akte Notaris Lieke Tukgali No. 16 tanggal 27 Juli 2010 dan akte No. 14 tanggal 14 Desember 2010 dan dikukuhkan sebagai badan hukum berdasarkan perubahan UU tentang Yayasan yang baru, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-1609.AH.01.04 tahun 2011, tanggal 28 Maret 2011.

## Gerakan Professional

Yayasan IBEK memulai gerakan professional dengan menggagas Forum Bisnis khususnya untuk menjembatani Pemerintah dengan dunia profesi/badan usaha. Pendirian Forum ini didasari oleh hasil kajian/inventarisasi IBEK terhadap beberapa Undang-Undang yang menyangkut hasil hajat kehidupan badan usaha yang secara faktual banyak yang tidak relevan lagi dengan situasi lingkungan strategis (lingstra) apalagi dalam menciptakan kondisi kondusif guna mengembangkan investasi.

Oleh karena itu Yayasan IBEK memfokuskan diri pada kondisi Undang-undang/Surat Keputusan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan kelancaran dunia usaha pada umumnya dan yang terpaut dibawah diskresi ekuin (Ekonomi Keuangan dan Bisnis).

Setiap hasil perumusan forum dialog ini diserahkan pada Pemerintah untuk dipakai sebagai masukan guna menggali UU/SK/PP yang sifatnya *overlapping*. Salah satu pergantian UU dimana IBEK berperan sebagai mitra Pemerintah adalah penerbitan UU Perpajakan, PPh, PPN, PBB dan Kepabeaan menggantikan UU/Peraturan Lama.

Peranan IBEK adalah mengumpulkan pada manager perusahaan berdialog dengan Dirjen Pajak dan jajarannya tentang penerapan UU Perpajakan No. 6, PPh No.8, PPN, PBB.



Seminar perpajakan dihadiri oleh Manager-manager perusahaan, berpegangan tangan dengan Dirjen Pajak, Drs. Salamun A.T.



Seminar perpajakan tentang sosialisasi pendalaman UU PPN yang diprakarsai IBEK dan tim dari Dirjen Pajak memberikan support penuh, dimana para manager perusahaan menyambut baik sikap Dirjen Pajak tersebut dan mengapresiasi usaha IBEK.



Seminar tentang PBB sangat berkembang dan sukses dimana pada saat itu wajib pajak PBB baru ratusan ribu wajib pajak, sekarang sudah mencapai ±60 juta orang. Sesuatu yang besar dinilai dari *performancenya*.

Disamping perpajakan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang jadi sorotan. Setiap barang yang masuk untuk keperluan pabrik harus melalui 62 meja pejabat bea cukai, mengakibatkan bahan baku dan barang modal yang diperlukan oleh pabrik sangat terlambat, pada gilirannya mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

IBEK juga mengumpulkan para manajer perusahaan baik PMDN/PMA untuk berdialog dengan Dirjen Bea Cukai. Kemudian hasil-hasil diskusi diserahkan pada Pemerintah ternyata ada *bottle neck*. Arus barang di Bea Cukai mengakibatkan biaya produksi sangat tinggi dan harga hasil Indonesia tidak mungkin bersaing dengan barang-barang hasil produksi luar negeri termasuk ASEAN.

### **Dialog dengan Dirjen Bea Cukai dan jajarannya yang yang diselenggarakan IBEK.**

Karena begitu sulitnya budaya Bea Cukai ini dirubah maka diusulkan pada Presiden agar Bea Cukai dihentikan untuk sementara, dan urusan barang-barang import dikontrakan dengan perusahaan Swiss yaitu SGS dengan bekerja sama dengan Sucofindo.

Dirjen Bea Cukai Wahono



Bukan hanya pajak dan bea cukai, juga BKPM harus diinjeksi agar bisa memberikan layanan *one stop service*. IBEK sedang memprakarsai dialog dengan Ketua BKPM dan jajarannya sehingga animo para investor semakin meningkat. Kenapa tidak, jika pada masa

sebelumnya untuk perusahaan ijin PMA diperlukan 2 tahun. Dengan dialog ini maka semua departemen melimpahkan wewenang ke BKPM untuk memberikan ijin, kecuali Deparlu, Hankam, Agama, Moneter dan BI. Sejak itu ijin untuk PMA dan PMDN diperas menjadi beberapa minggu saja dari tahun ke tahun.

Di Kongres sedunia *International Association of Financial Executive (IAFEI)* di Madrid Spanyol diberikan kesempatan untuk beliau sebagai *keynote speaker*.



Ketua BKPM, Ir. Suhartoyo memberikan support untuk dialog BKPM dengan para Direktur/manajer perusahaan. Juga Ketua Umum IBEK Laurence A. Manullang, memprakarsai Ir. Suhartoyo Kepala BKPM sebagai *Keynote Speaker* di kongres sedunia IAFEI di Madrid Spanyol dalam rangka mempromosikan investasi di Indonesia pada tahun 1982.

Dari BKPM, IBEK menyoroti lambatnya pertumbuhan Pasar Modal (BAPEPAM). Ketua IBEK Laurence A. Manullang sangat aktif berdialog dengan dua mantan Ketua BAPEPAM, Dr. Sutadi Sukarja, dan Prof. Barli Halim.

Ternyata tersendatnya perkembangan Bapepam adalah dikarenakan tidak cukupnya sarana sebagai landasan hukum untuk merealisasikannya.

Maka pada masa Prof. Dr. Barli Halim diajukan untuk menginventarisasi semua perangkat hukum dan diterbitkan UU/Peraturan yang baru sebagai nafas baru BAPEPAM. Pada saat itu baru 5 perusahaan terdaftar di Bapepam yang dibandingkan dengan sekarang sudah ratusan perusahaan dengan kapitalisasi triliunan.



Ketua BAPEPAM Sutadi Sukarja, memberikan uluran tangan berdialog dengan para direktur perusahaan dalam forum IBEK.



Ketua BAPEPAM Prof. Dr. Barli Halim mengulurkan tangan untuk improvisasi *growth* BAPEPAM.

Dalam perjalanan simposium maupun dialog peranan intelligent dan security juga sangat menentukan. Maka IBEK mengundang Pangkomkaptib dan Pangab ABRI – Benny Murdhani berdialog dengan anggota IBEK agar jangan terjadi kekakuan.



Nampak Sudomo sebagai Pangkomkaptib berdialog dengan Direktur perusahaan dalam forum IBEK, dan Jenderal Benny Murdhani Pangab ABRI siap berdialog.



Bukan hanya secara nasional, IBEK juga sempat memprakarsai kongres sedunia di Jakarta yang dihadiri oleh 400 orang pada eksekutif dari 5 benua dimana Henry Kissinger, William Miller, Menteri Keuangan USA, Prof. MacCracken Chairman Security Council USA memberikan dukungannya.



Henry Kissinger dengan Laurence A. Manullang

Kongres ini diselenggarakan oleh *International Association of Financial Executive Institutor* (IAFEI) dimana Ketua IBEK Prof. Dr. Luarence A. Manullang menjabat sebagai Wakil Presiden sedunia dari organisasi elit ini. Kongres ini dibuka oleh Jenderal Umar Wiradikusuma dan Keynote Speaker of Prof. Dr. Ali Wardhana, Menko Ekuin pada waktu itu.



Prof. Dr. Laurence A. Manullang menghunjuk Tanri Abeng sebagai chairman organizing committee dari Kongres ini. Nampak suasa ramah tamah dengan Menko Ekuin sebelum beliau mengucapkan *keynote speechnya*.



Dengan Menteri Keuangan AS William Miller



Dengan Chairman Security Council AS Prof. Dr. McCracken

Selama kurun waktu 15 tahun dari 1971 s/d 1986, IBEK telah berhasil mengumpulkan 2970 eksekutif nasional dari 950 perusahaan BUMN, PMA da PMDN. Semuanya sudah dengan level tertinggi dan telah mengikuti *workshop symposium* di dalam negeri maupun luar negeri, dan dengan tingkat profesi yang tinggi. Pertemuan demi pertemuan ini dengan kualitas dan disiplin seminar yang tinggi dan tingkat professional dan nara sumber yang boleh dikatakan tinggi sekali yang terdiri dari para expert seperti USA, UK, France, Germany dan dalam negeri.



**BUMN**

Bukan hanya segmen tadi disoroti, juga BUMN yang berada dalam yuridiksi Departemen Keuangan dalam binaan Direktur Pengembangan BUMN-Ekselen Dua. Laurence A. Manullang mengusulkan kepada Presiden Suharto agar BUMN ditingkatkan menjadi Kementerian Kementerian Negara dipimpin oleh seorang Menteri, karena penting *income* negara ditopang dari pendapatan dari non pajak merupakan deviden dari BUMN. Karena BUMN merupakan sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Disiarkan melalui Harian Merdeka terbitan Rabu, tgl 25 Maret 1987.



**STIE-IBEK**

Dalam dialog tahun 1986 para peserta yang terdiri dari para direktur dan manajer perusahaan yang telah mengikuti manfaat menghadiri dialog IBEK sangat puas karena pemanfaatan waktu yang sangat intensif, mereka menyimpulkan bahwa materi topik yang dibahas selama tiga hari sudah sama cakupannya dengan satu semester di kuliah pendidikan tinggi perguruan tinggi yang diselenggarakan secara konvensional.

Dalam akhir pertemuan mereka mengajukan suatu himbauan sbb:

Kepada Yth Bapak Laurence A. Manullang, anda telah berhasil memilih topik dan pembicaraan yang sangat professional membahas topik-topik yang relevan dimana topik itu ditujukan pada *high target group* yaitu pada direktur dan manajer perusahaan.

Anda tidak terlalu berat tugasnya sebab *audience* anda adalah orang sangat professional dan anda dapat dengan cepat menyelesaikan topik-topik itu dengan hasil yang memuaskan. Namun kami menghimbau agar Pak Laurence A. Manullang dapat meringankan beban para direktur/manajer kami ini semuanya dengan memproduksi tenaga muda lulusan S1 Universitas yang siap pakai. Sebab pada umumnya mereka yang kami rekrut memerlukan waktu 6 bulan baru bisa kerja produktif, itupun memilih budaya yang harus dimata-matai dan kurang disiplin. Oleh sebab itu kami mohon agar IBEK membuka suatu perguruan tinggi yang menerapkan *experimental & theoritical education* seimbang dan *link and match*.

Himbauan itu Manullang pikirkan satu tahun, dan bulan Agustus 1987 Laurence A. Manullang memutuskan membuka perguruan tinggi. Maka beliau menghubungi Kopertis 3 membuka pendidikan tinggi bisnis dan ekonomi.

Jawaban yang diterima adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sudah penuh dan ijin untuk itu untuk ditutup.

Dengan gigih Laurence A. Manullang membuktikan bahwa telah terjadi pembajakan pada manajer dilapangan berarti manajer yang professional sangat dibutuhkan.

Dengan wewenang yang ada ditangan Prof. Dr. Sumadikarta diberikan **Ijin Operasional** untuk pendirian STIE-IBEK dengan **No. 15/Kop.III/S-VII/1987** tanggal 3/08/1987 dengan tiga jurusan yaitu Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan untuk program S1, D3, dimana diberikan waktu membuktikan perkembangannya selama kurun waktu 2 tahun.

Karena kesungguhan yang prima, ijin operasional ini dapat ditingkatkan jadi **Terdaftar** ijin Dirjen Dikti **No.0256/0/1989 tanggal 26 April 1989**.

Sambutan mahasiswa atau keberadaan STIE-IEBK makin berkembang, dan atas kegigihan semua pihak, ijin **Terdaftar** ditingkatkan jadi ijin **Diakui** per **No.106/Dikti/Kop/1992**, tanggal 9 April 1992. Tiga tahun setelah **Terdaftar**, progresnya sangat cepat menggembirakan sebab Dirjen Dikti memberikan tenggang waktu sebenarnya selama 5 tahun tetapi dapat dicapai selama 3 tahun. Namun karena kesungguh-sungguhan pada dosen dan mahasiswa maka ijin diakui ini dilalui satu tahun saja, sebab STIE-IBEK telah berhasil memperoleh ijin **Disamakan** tanggal 1 Mei 1993 dengan **No.219/Dikti/Kop/1993**. Walaupun ijin **Diakui** diberikan 4 tahun. Pada waktu yang sama, telah pula diperoleh Ijin Penyelenggaraan Magister Management dengan **No.437/Dikti/Kop/1993 tanggal 17 Juli 1993**.

## **Sistem Akreditasi**

Kemudian system penilaian berkembang dari sistem **Terdaftar**, **Diakui**, dan **Disamakan** jadi system **Akreditasi**, maka berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan **No.78/D/O/1997**, tanggal 17 Agustus 1997 yang mengacu pada **UU No.2/1989** dan **PP30/1989**, maka kualitas program studi dikukuhkan dengan Akreditasi.

Maka pada **11 Agustus 1998** dengan Nomor **001/BAN-PT/AK-I/V/III/1998** program studi Manajemen dapat akreditasi B dan akreditasi Akuntansi C.

Akan tetapi IBEK mengirimkan gugatan terhadap prodi Akuntansi diakreditasi C sedang ini adalah primadona prodi di IBEK, maka kami minta agar peringkat akreditasi itu ditinjau kembali. Maka BAN PT dalam SK nya **No.022/BAN-PT/AK-IV/VIII/2000**, tanggal 31 Agustus 2000 memutuskan prodi Akuntansi STIE-IBEK mendapat akreditasi B.

Evaluasi berikutnya tahun 2014, **No.10/BAN-PT/AK-VII/S-1/IV/2004**, prodi Manajemen mendapat nilai **akreditasi B**.

Tahun 2011, dengan **No.008/BAN-PT/AK-IX/S-1/1/2006**, Prodi Akuntansi dapat B lagi berlaku s/d 26 Januari 2011. Dengan akreditasi Magister Manajemen B sesuai dengan **SK 025/BAN-PT/AK-1/S-2/IX/2000 tanggal 13 September 2000**.

Demikianlah perkembangan yang sangat positif dari STIE-IBEK, maka kami dapat arahan dari Dirjen Dikti untuk dapat ditingkatkan pada level Universitas sebab ada trend bahwa Sekolah Tinggi akan dilanda kejenuhan.

## **Universitas Timbul Nusantara**

Feasibility study untuk Universitas pun disusun dan pemilihan program studi diteliti, *recruitment* dosen tetap dilaksanakan. STIE IBEK memerlukan waktu 5 tahun untuk mempersiapkan semua perangkat yang diperlukan untuk Universitas. Diperlukan 5 tahun sebab sempat tertunda karena masalah nasional yang berkejolak yang terjadi tahun 1998 s/d 2000, dimana agak lama dampaknya mengganggu penyelenggaraan pendidikan tinggi STIE-IBEK.

Dengan arahan Kasubdit maupun Direktur Pendidikan Pembelajaran, maka STIE-IBEK berhasil merampungkan semua persyaratan jadi Universitas yang disebut Universitas Timbul Nusantara pada tanggal 10 November 2006 dengan No.261/D/0/2006 dengan **9 tambahan prodi S1 yaitu: (1) Ilmu Hukum, (2) Ilmu Komunikasi, (3) Sastra Inggris, (4) Teknik Informatika, (5) Matematika, (6) Biologi, (7) Ilmu Perikanan, (8) Arsitektur, (9) Teknik Sipil**, disamping S1 Akuntansi dan Manajemen dengan Magister Manajemen





sehingga berjumlah 12 prodi.

UTIRA ingin menunjukkan kualitasnya seperti telah terkenal pada waktu masih STIE-IBEK khususnya dalam prodi Akuntansi. Maka pada tahun 2007, UTIRA mengikuti **STAN National Accounting Challenges 2007**, diikuti oleh **73 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Indonesia**, yaitu **UI-mengirimkan 3 tim, UNPAD-2 tim, STAN-3 tim, UTIRA-2 tim, USU-1 tim, Atmajaya-3 tim, UNTAR-3 tim, Andalas-2 tim, UNPAR Bandung-3 tim, Gunadarma-3 tim, Mercubuana-3 tim, Widyatama Bandung-3 tim, Methodist Medan-2 tim, UPN-1 tim, Univ.Jambi-1 tim, UHAMKA-1 tim, Univ.Bengkulu-1 tim, STIE Supra-1 tim, STIE-AD-1 tim, UPB-1tim, UNNES-2tim, UII-2tim, Unisula-2tim, Univ.Brawijaya-1rim,UNS-1tim, UNESA-1tim, STIKOM-1 tim, UNPAR-1tim. Dari jumlah 73 peserta ini 20 tim berhasil lolos ke babak berikutnya yaitu **Bank Think Fast** yaitu, **UI-3tim, UGM-2tim, UTIRA-IBEK-1tim, STAN-3tim, Atmajaya-1tim, UNTAR-3tim, UNPAR-2tim, Univ.Patra-1tim, Univ.Methodist Medan-1tim, STIE-IBS-1tim.****

Nampaknya dalam kelompok ini sangat mencengangkan juri dalam penguasaan peserta dalam Akuntansi komprehensif manajemen. Ternyata tim UI, nilai 215, Tim UTIRA-IBEK 203, Tim UNPAR 145, Tim UI 1-115, maka untuk babak berikutnya Tim UI 2 dan Tim UTIRA lolos. Karena 2 tim yang lolos untuk babak berikutnya, maka 10 kelompok lolos mengikuti *Corporate Challenge*.

Satu (1) Tim 2 UI, (2) Tim 3 UI, (3) Tim I – UGM, (4) Tim 2 –UGM, (5) Tim 2 UNAIR Surabaya, (6) Tim 2 UNPAR Bandung, (7) Tim Univ.Patra Surabaya, (8) Tim 3 STAN, (9) Tim I Univ. Atmajaya Jogja, (10) **Tim I UTIRA-IBEK**. Nilai dari 10 besar itu adalah Tim 2 Univ.Patra Surabaya 680, Tim 2 UGM 660, Tim 3 STAN 615, Tim I UTIRA-IBEK 585, Tim 2 Airlangga 490, Tim 2 UI 480, Tim 2 UNPAR 425, Tim 2 UI 420, Tim 1 UGM 45, Tim Univ. Atmajaya 410. Kemudian tahap terakhir diadu dalam *Future Accounting Challenge* dan keluarlah berhasil akhir sebagai berikut:

Ranking I – Tim 2 UI

Ranking II – Tim 2 Petra Surabaya

Ranking III – Tim 2 Airlangga

**Ranking IV bersama – Tim 1 UTIRA-IBEK**

Ranking IV bersama- Tim 2-UGM

Ranking IV bersama-Tim 3 STAN

Ranking VII –Tim 2 UNPAR

Ranking VIII – Tim 3 UI

Ranking IX – Tim 3 UGM

Ranking X – Tim 1 Univ.Atmajaya



Kompetisi sangat melelahkan diikuti selama 3 bulan, namun semua puas memperoleh hasilnya. Suatu prestasi yang sangat mengagumkan

## Seminar Pemberantasan Korupsi

UTIRA-IBEK Program S2 memprakarsai seminar untuk mengidentifikasi penghalang pembangunan yaitu salah satunya korupsi yang *crucial* untuk diatasi. UTIRA berhasil merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemberantasan korupsi dimana rumusan itu disampaikan pada Presiden RI, dan beliau menerimanya dengan baik per surat beliau **No.BA 026078 tgl 30 November 2006**.



Ketua STIE-IBEK memberikan plakat Penghargaan kepada Ketua MA dalam Seminar "Pemberantasan Korupsi di Indonesia"



Ketua STIE-IBEK dengan Wakil Jaksa Agung

10

Ditindak lanjuti oleh seminar pemberantasan korupsi oleh Fakultas Hukum UTIRA dengan KPK memberikan masukan yang lebih komprehensif pada KPK dan Presiden RI



Penasehat KPK Abdullah Hehamahua memberikan masukan pada seminar

## DIALOG DENGAN MENPAN

Sebagaimana telah ditemukan hasil seminar IBEK, adapun penghalang pembangunan nasional adalah: **1) Korupsi, 2) Birokrasi, 3) Infrastruktur**. Seminar IBEK dengan topik korupsi kerjasama dengan KPK, BPK dll telah diformulasikan dan diteruskan kepada Presiden. Infrastruktur juga telah dibahas dalam 6 koridor pembangunan ekonomi.

Reformasi birokrasi telah dibahas mengenai pentingnya peranan birokrasi dalam pembangunan walaupun jumlah mereka hanya 4 juta orang seluruh Indonesia. Namun setelah dilihat dari tahun ke tahun terjadi pembengkakan birokrasi yang rasionya untuk administratif 65% dan hanya 35% untuk tenaga kreatif.

Karena birokrasi yang berperan dalam administrasi ini membengkak maka kecenderungan mata rantai menjadi panjang sehingga membebani badan usaha selain lambat tambah juga biaya makin besar. Panjangnya mata rantai ini terjadi dalam perizinan. Pembahasan dengan Menpan diberikan masukan sbb:

- a) Agar diadakan moratorium penerimaan pegawai 5 tahun. Tidak ada menerima PNS selama 5 tahun.
- b) PNS yang pensiun jangan diganti.
- c) PNS yang kurang produktif dan terlalu banyak berkecimpung di perizinan yang dilihat memperlambat pertumbuhan ekonomi, dikurangi kalau perlu dipensiun secara dini.
- d) PNS yang masuk yang berasal dari STIA (Sekolah Tidak Ijazah Ada) dipecat.
- e) Birokrasi harus dirampingkan.
- f) Struktur organisasi bisa ramping dan lebih lincah melayani.
- g) Ratio birokrasi administrasi dicitutkan dari 65% ke 30% dan staff administratif 35% dan staf kreatif ke 70%.
- h) Kalau perlu suatu usaha tidak perlu minta ijin, cukup dilaporkan saja ke Pemda setempat tembusan ke departemen yang terkait.



Foto staff UTIRA dengan Menpan Letjen EE. Magindaan.

Dialog dengan Gubernur Lemhannas menyangkut strategi nasional dimana diharapkan UTIRA dipersiapkan siap menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN.





Gubernur Lemhannas Jenderal Gumilar menugaskan pimpinan UTIRA menyusun materi perkuliahan disesuaikan dengan rencana strategis nasional.

### **Rencana Seminar**

Rencana Seminar yang maha dahsyat sedang direncanakan yaitu:

1. Bagaimanakah mendatangkan 57150 ton batangan emas yang tersimpan di Switzerland sebagai harta karun Indonesia yang disimpan oleh Bung Karno, yang dipakai oleh negara-negara lain sebagai *collateral* dengan sewa akumulatif saat ini sudah mencapai 48.557 ton kalau dinilai semuanya sudah mencapai 3.2 triliun US Dollar, kembali ke Indonesia.
2. Seminar mengundang investor untuk menanamkan modalnya di 92 pulau terluar di Indonesia dengan tax holiday yang menarik dalam rangka pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan nasional.



Sesuai dengan akebilitasnya terhadap *Global Monetary Cycle*

The Grand Hilton *memorial agreement*.

Seminar ini direncanakan untuk melibatkan Deplu, Federal Reserve Bank, IMF, Vatican dan Istana Kerajaan Inggris, dan Henry Kissinger, serta George Soros



sebagai *Commissioner Federal Reserve Bank*, untuk dipersembahkan pada Presiden RI. Akan tetapi seminar besar ini biar diurungkan dulu, sebab konsentrasi fokus pada Tridharma perguruan tinggi pelaksanaan Peraturan Menteri Ristek/pendidikan tinggi No.44/2015.

### **Permenristektinggi No.44/2015**

Penangguhan penyelenggaraan seminar ini diputuskan setelah membaca Permenristektinggi No.44/2015 dimana cakupan dan penjelasan tentang Tridharma perguruan tinggi sangat jelas komprehensif serta integratif dan kontekstual.

Dalam mewujudkan Tridharma pendidikan tinggi ini harus dimulai dengan aktualisasi diri dalam pelaporan UTIRA dalam EPSBED sebagai dasar tayangan pada Forlab Dikti. Rektor telah menandatangani pernyataan Pakta Integritas, dimana butir-butir didalamnya harus terlaksana dengan laporan 2015/1 sudah diserahkan ke Kopertis 3, selambat-lambatnya tgl 15 Juni 2016.

Juga semua compliance terhadap perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No.44/2015 secara konsekuen di patuhi dan dilaksanakan karena nilai pendidikan tinggi adalah terletak pada kepatuhannya pada UU/Peraturan yang berlaku.

### **Inspirasi**



Banyak terinspirasi oleh Presiden Megawati yang membidani pelaksanaan demokrasi dengan Pilkada Pilpres pemilihan rakyat secara langsung dan terbuka



Semua itu karena gebrakan Gus Dur yang telah mengadakan gebrakan terhadap demokrasi dan penyelenggaraan negara dilakukan secara transparansi.

### **Pembinaan Oleh Kopertis 3**

Perubahan status STIE-IBEK menjadi Universitas Timbul Nusantara mempunyai konsekuensi berat dalam penyelenggaraan pembelajaran dan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya, menyangkut:

- a. Memindahkan mahasiswa yang masih dalam proses belajar dari STIE-IBEK ke Universitas Timbul Nusantara
- b. Menyusun konversi mata kuliah yang telah diambil di STIE-IBEK ke Universitas Timbul Nusantara.
- c. Merekrut tenaga MIS untuk menangani pelaporan ke EPSBED.
- d. Merencanakan latihan dan training pada staff MIS/BAAK tentang pengisian dan *designing program* yang dituntut oleh EPSBED yang masih dalam taraf pengembangan dan pada saat itu perubahan dan peningkatan pelaporan terus oleh Dikti.



Disamping terbitnya UU12/12 yang harus dipatuhi oleh seluruh Perguruan Tinggi, dimana telah diamanatkan hanya prodi yang terakreditasi yang dapat menerbitkan ijazah. Namun karena motivasi dan binaan Koordinator wilayah 3 Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA melalui didikan keras yang sangat mendidik dan mempersiapkan diri dan staff membantu UTIRA mengadopsi program EPSBED dan melaporkannya ke Dikti.

Syukurlah masa sulit itu dapat dilalui akhirnya laporan UTIRA ke EPSBED dari tahun 2006 s/d 2013 100% complete.

Dan pada saat itu juga UTIRA berhasil mengisi borang untuk akreditasi semua program studi. Berdasarkan isian borang-borang itu BAN berkenan mengirimkan accessor untuk 10 program studi dan hasilnya adalah 7 program terakreditasi yaitu:

1. Prodi S1 Manajemen No 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 tgl 18 Oktober 2012
2. Prodi S2 MM No.012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 tgl 10 Januari 2013
3. Prodi S1 Ilmu Hukum No.106/SK/BAN-PT/Ak/XV/S/IV/2013 tgl 4 April 2013
4. Prodi S1 Sastra Inggris No.145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 tgl 23 Mei 2014
5. Prodi S1 Matematika. No 377/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2014 tgl 27 September 2014
6. Prodi S1 Akuntansi No.194/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 tgl 5 Juli 2014
7. Prodi S1 Perikanan & Kelautan No.275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 tgl 9/08/2018
8. Prodi S1 Arsitektur No.275/AK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 tgl 9/8/2014
9. Prodi S1 Ilmu Komunikasi No.275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 tgl 9/8/2014
10. Prodi S1 Teknik Sipil Belum visitasi, telah mendapat fasilitas untuk bisa dievaluasi oleh lembaga akreditasi mandiri dan semua persyaratan sudah diserahkan pada BAN. Sementara SK Akreditasi belum diterbitkan status

akreditasi prodi ini mengacu pada SE Dirjen No.160/E/AK/2013 tgl 1 Maret 2013

11. Prodi S1 TI. Dimasukkan dalam pembinaan LAM. Semua persyaratan sudah masuk, sementara menunggu visitasi dan SK Akreditasi maka perlakuan akreditasi prodi ini mengacu pada Surat Dirjen Dikti No.160/E/AK/2013, tgl 1 Maret 2013.
12. Prodi S1 Biologi No.530/BAN/LL/2013 tgl 18 April 2013. Belum cukup angka namun diperkenankan mengajukan kembali dengan mengacu pada Surat Dirjen No.160/E/Ak/2013 tgl 1 Maret 2013.

UTIRA dalam naungan Kopertis III berhasil selamat dapat melaksanakan amanat UU12/12 berkat motivasi dan dorongan Ibu Koordinator Prof. Dr. Ilza Mayuni.

### **Peningkatan UTIRA**

UTIRA dituntut meningkatkan kinerja dan kesiapan fasilitas minimal mencapai standard minimum seperti diatur oleh Peraturan Menteri Ristek/Teknologi/Pendidikan Tinggi No.44/2015. Tuntutan makin meningkat, tentu perjuangan makin berat dan tetap memerlukan bimbingan/arahan dan pembinaan dari Koordinator Kopertis 3.



Dengan diteruskannya tanggung jawab itu pada Dr. Ir. Illah Sailah, Koordinator Wilayah 3, maka UTIRA merasa termotivasi atas sentuhan-sentuhan beliau yang mengambil pendekatan antara Ibu dan anak, berdasarkan kasih sayang namun disiplin ditegaskan secara konsekuen. Langkah beliau yang pertama adalah telah mengadakan monev pada tgl 12 Mei 2016, dan menginstruksikan Rektor menandatangani Pakta Integritas sebagai bukti keseriusan pimpinan UTIRA mematuhi dan melaksanakan PP Menteri No.44/2015.

Juga dalam rangka pembinaan beliau menginstruksikan agar EPSBED 2015/1 harus sudah diserahkan pada tgl 15 Juni 2016. Untuk memenuhi deadline ini UTIRA telah bekerja keras setiap hari dari jam 10.30 pagi s/d 24 malam. UTIRA juga mendapat bantuan Dr. Wanardi dari IPB, serta 4 orang tenaga muda dari UI. Kerja keras ini tidak bisa dihindari karena laporan EPSBED UTIRA 2014/2 yang telah diterima Kopertis masih ditahan tidak di upload ke Dikti dan dimohon untuk dibuka karena belum juga terbuka. Barangkali Kopertis 3 ingin membuat UTIRA sadar dan harus melalui *hardship* yang tidak tanggung-tanggung.

*Diterbitkan : 31 Mei 2016  
Rektorat Universitas Timbul Nusantara*